ANALISIS DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

oleh:

SHELYANA SANDRA DEWI

B 300 170 231

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

SHELYANA SANDRA DEWI
B 300 170 231

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Muhammad Arif, S.E., M.Ec.Dev

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN

OLEH
SHELYANA SANDRA DEWI
B300170231

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Muhammad Arif, S.E., M.Ec., Dev.** ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Muhammad Anas, S.E., M.Si** ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Sitti Retno Faridatussalam, S.E., M.M** ( )
   (Anngota II Dewan Penguji)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, M.Si.
NIDN. 0616087401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Oktober 2021

Penulis

SHELYANA SANDRA DEWI

B300170231

ANALISIS DAMPAK DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dampak Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) dan pembangunan wilayah di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dana desa dan indeks desa membangun di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 yang diperoleh dari Sistem Informasi Desa (Kemendesa), Indeks Desa Membangun (IDM), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Berdasarkan hasil estimasi Regresi Data Panel dan uji hipotesis, ditemukan bahwa bahwa Dana Desa berpengaruh positif terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

Kata kunci : dana desa, indeks desa membangun, data panel, *fixed effect model*

Abstract

This study aimed to estimate the impact of Village Fund on the Village Development Index (IDM) and regional development in Klaten Regency in 2016-2020. The data used in this study are village fund data and the index of developing villages in Klaten Regency in 2016-2020 which were obtained from the Village Information System (Kemendesa), the Village Development Index (IDM), and Central Statistics Agency (BPS). The data analysis used in this research is panel data regression. Based on the estimation results of Panel Data Regression and hypothesis testing, it was found that the Village Fund has a positive effect on the Village Building Index (IDM).

Keywords: village fund, index of developing villages, panel data, fixed effect model

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No.22 Tahun 1999, ternyata belum mampu memberikan solusi yang optimal bagi berkurangnya ketimpangan dan kemisikinan di Indonesia, dalam pelaksanaannya antara Tahun 2000 hingga 2008, tingkat kemiskinan masih berada di atas 15 persen (Badan Pusat Statistik, 2021) yang mengindikasikan kurang efektifnya amanat-amanat dalam UU tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Mendasarkan hal tersebut, Pemerintah melakukan pembenahan yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sekaligus mencabut UU No. 22 Tahun 1999.

Pemberlakuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan arah baru dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia, jika sebelumnya

pembangunan daerah belum secara konkret menggunakan Desa sebagai subyek sekaligus objek pembangunan, pada UU ini secara tegas disebutkan bahwa pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk desa, sehingga saat ini Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan.

Melengkapi UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah menetapkan pula UU No.6 Tahun 2014 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa, di mana dalam Pasal 72 Ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa berwenang menyelenggarakan pembangunan dengan pemanfaatan secara optimal Dana Desa. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang dapat digunakan dalam proses pembangunan di tingkat desa, sehingga Pemerintah Pusat berkewajiban mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mendasarkan pada UU ini pula, diamanahkan bahwa Pemerintah Desa memiliki kuasa terhadap pengelolaan pendanaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya yang paling sesuai, di mana tujuan akhirnya adalah berkurangnya ketimpangan daerah karena masing-masing Desa telah mempu meningkatkan pertumbuhan ekonominya berdasarkan potensi asli yang dimiliki, Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan dana desa, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi daerah yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Secara detail sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi dan tujuan dana desa adalah untuk: (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Tujuan- tujuan tersebut dimaknai sebagai tercapainya kemandirian wilayah desa

yang tujuan utamanya adalah tercapainya pengelolaan desa yang berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Kemandirian wilayah sebagai konsep pertumbuhan wilayah di Indonesia teridentifikasi melalui Indeks Desa Membangun (IDM), di mana IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen dasar yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. Dengan adanya IDM, gambaran perkembangan kemandirian desa dapat terlihat dan dapat digunakan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang tepat dari pemerintah desa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat efektivitas program desentralisasi fiskal melalui Dana Desa dengan pembangunan wilayah di Kabupaten Klaten yang secara spasial terletak di batas koridor pembangunan wilayah Jawa Tengah dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di mana ditemukan ketimpangan dan sebaran masyarakat miskin yang cukup tinggi diantara wilayah-wilayah di Kabupaten Klaten. Masalah kemiskinan dan ketimpangan inilah yang menjadi fokus pemerintah dalam penerapan kebijakan dana desa dengan tujuan utamanya adalah tercapainya kemandirian dan pembangunan daerah dengan menciptakan pertumbuhan wilayah dan mampu mengentaskan masalah kemiskinan di wilayah masing-masing.

Sebaran kemiskinan Kabupaten Klaten sebagaimana penduduk miskin Klaten terkonsentrasi di bagian selatan dan barat yang berbatasan langsung dengan jajaran pegunungan seribu di Wilayah Sukoharjo dan Gunungkidul, kemudian semakin berkurang jika ditarik arah kepusat kota, sehingga wilayah di Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Kecamatan Kalikotes memiliki jumlah penduduk miskin yang rendah. Hal ini terjadi karena wilayah Barat Klaten seperti Bayat, Gantiwarno dan sekitanya merupakan wilayah yang didominasi oleh pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama penduduknya (Klaten dalam Angka, 2020). Sedangkan wilayah tengah Klaten yang terletak disebanjang koridor jalan utama penghubung Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh sektor perdagangan, jasa dan pemerintahan, sehingga memunculkan jarak atau perbedaan pendapatan yang cukup tinggi diantara wilayah ini.

Perkembangan wilayah sebagai capaian pembangunan wilayah regional melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (RI) No. 2 Tahun 2016 direperenstasikan dalam Indek Desa Membangun (IDM) yang merangkum perkembangan wilayah berdasarkan komponen ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan atau ekologi, mendasarkan indikator ini suatu wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah mandiri (sembada), maju (pra-sembada), berkembang (madya), tertinggal (pra-madya) dan wilayah sangat tertinggal. Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 1.2, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Klaten dalam aggregat kecamatan terkategori dalam kelompok wilayah berkembang (madya), dan hanya dua Kecamatan yang terklasifikasi dalam ketegori maju yaitu Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Klaten Utara. Kedua wilayah ini memiliki potensi yang cukup berbeda, di Kemalang pertumbuhan ekonomi dan kemajuan wilayah ditopang melalui sektor penggalian serta pariwisata, sedangkan Klaten Utara yang merupakan sentra aktivitas dan pusat pemerintahan ditopang oleh sektor jasa dan perdangangan.

Otonomi daerah sebagai strategi dalam mencapai kemajuan wilayah memerlukan instrumen yang berperan sebagai penggerak kegiatan ditingkat daerah, selain pelimpahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan tentang pemberian Dana Desa sebagai instrumen penggerak kegiatan-kegiatan pembangunan di level regional, yang nominalnya diatur melalui kalkulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Jarak yang cukup lebar antara wilayah penerima Dana Desa di Kabupaten Klaten, di mana diketahui bahwa wilayah dengan distribusi Dana Desa terbesar diterima oleh Kecamatan Bayat sebesar Rp. 20,807,256,000 sedangkan wilayah dengan Dana Desa terkecil diterima oleh Kecamatan Klaten Tengah yaitu sebesar Rp. 2,602,651,000. Menurut Undanh-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perbedaan penerimaan Dana Desa tersebut terjadi akibat adanya penyesuaian kelompok wilayah di mana semakin maju wilayah yang berarti wilayah tersebut semakin mandiri maka penerimaan Dana Desanya akan semakin sedikit, dan berlaku pula kebalikannya.

Mendasarkan pada beberapa hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk melihat efektivitas kebijakan Dana Desa terhadap pekembangan wilayah di Kabupaten Klaten, untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel pada 26 Kecamatan yang diamati selama kurun waktu 5 tahun, sehingga diharapkan dapat menemukan hubungan antara pemberlakuan Dana Desa terhadap kemajuan suatu wilayah yang terwakili oleh Indeks Desa Membangun.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data Dana Desa tahun 2016-2020, data IDM (Indeks Desa Membangun) tahun 2016-2020, jumlah penduduk total tahun 2020, dan jumlah penduduk miskin tahun 2020 di Kabupaten Klaten. Data tersebut diperoleh dari Sistem Informasi Desa (Kemendesa), Indeks Desa Membangun (IDM), Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Estimasi

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel *Cross Section*

Variabel	**Koefisien Regresi**					
	PLS	**Prob**	**FEM**	**Prob**	**REM**	**Prob**
C	1.31673	0.0000	-0.36763	0.2904	0.77348	0.0005
LOG (DD)	-0.02793	0.0001	0.04481	0.0034	-0.00447	0.6345
R^2	0.112579		0.651514		0.001565	
Adj. R^2	0.105646		0.563547		-0.006236	
F-statistik	16.23821		7.406314		0.200570	
ProbF-Statistik	0.000095		0.000000		0.655018	

3.2 Pemilihan Model Estimasi Terbaik

Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	6.371592	(25, 103)	0.0000

Kesimpulannya adalah H_0 ditolak karena *p-value* untuk *F* (0,0000) ≤ 0,05. Sehingga model yang terbaik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 3. Hasil Estimasi Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	17.942627	1	0.0000

Kesimpulannya adalah H_0 ditolak karena *p-value* untuk *Chi-Square* (0,0000) ≤ 0,05. Sehingga model yang terbaik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 1 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

IDM_{it} = -0.36763 + 0.044817 $LogDana_Desa_{it}$

(0.0034)***

R^2 = 0.651514; Adj R^2 = 0.563547; F.Stat = 7.406314; Prob F-Stat = 0,0000

Keterangan:

*Signifikan pada α – 0,01

** Signifikan pada α – 0,05

*** Signifikan pada α – 0,10

Angka dalam kurung adalah probabilitas nilai *t*-statistik

Tabel 4. Efek dan Konstanta *Fixed Effect Model* (FEM)

No	Kecamatan	Effect	Konstanta
1	Bayat	0.038	-0.330
2	Cawas	0.008	-0.376
3	Ceper	0.011	-0.356
4	Delanggu	0.000	-0.367
5	Gantiwarno	0.033	-0.335
6	Jatinom	0.045	-0.323
7	Jogonalan	0.000	-0.368
8	Juwiring	0.034	-0.333
9	Kalikotes	0.056	-0.424
10	Karananom	0.035	-0.333
11	Karangdowo	0.045	-0.323
12	Karangnongko	0.026	-0.394
13	Kebonarum	0.054	-0.421
14	Kemalang	0.042	-0.409
15	Klaten Selatan	0.040	-0.408
16	Klaten Tengah	0.073	-0.440

17	Klaten Utara	0.157	-0.524
18	Manisrenggo	0.006	-0.362
19	Ngawen	0.022	-0.345
20	Pedan	0.006	-0.362
21	Polanharjo	0.028	-0.340
22	Prambanan	0.005	-0.373
23	Trucuk	0.035	-0.333
24	Tulung	0.041	-0.327
25	Wedi	0.018	-0.349
26	Wonosari	0.065	-0.303

3.3 Interpretasi Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan daya ramal dari model terestimasi. Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa nilai (R^2) untuk *Fixed Effect Model* (FEM) sebesar 0,651514, artinya 65,15% variasi variabel Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dijelaskan oleh variabel dana desa. Sisanya 34,85% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

3.4 Uji Validitas Pengaruh (Uji *t*)

Hasil uji validasi pengaruh (uji *t*) untuk variabel Dana Desa pada *Fixed Effect Model* (FEM) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).

Variabel Dana Desa memiliki koefisien regresi sebesar 0,044817 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0034 yang secara statistik tersignifikansi pada derajat α = 1% (0,01). Pola hubungan antara Dana Desa dengan Indeks Desa Membangun adalah linier-logaritma sehingga apabila Dana Desa mengalami kenaikan sebesar 1 Rupiah maka Indeks Desa Membangun akan mengalami kenaikan sebesar (0,044817/100)= 0.00045 angka indeks. Sebaliknya apabila jumlah Dana Desa mengalami penurunan sebesar 1 Rupiah maka Indeks Desa Membangun di Kecamatan seluruh Kabupaten Klaten akan mengalami penurunan sebesar 0.00045 angka indeks.

3.5 Interpretasi Ekonomi

Berdasarkan uji validasi pengaruh (Uji *t*) pada *Fixed Effect Model* (FEM) dapat diketahui bahwa variabel Dana Desa sebagai variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). Dapat diartikan

bahwa apabila semakin besar Dana Desa yang diberikan kepada suatu daerah atau kecamatan maka nilai Indeks Desa Membangun (IDM) semakin meningkat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan Desentralisasi Dana Desa telah mampu meningkatkan pembangunan wilayah di Kabupaten Klaten, dengan kata lain pelaksanakan program Dana Desa sukses meningkatkan pembangun di wilayah Kabupaten Klaten.

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis awal dan juga penelitian terdahulu. Dana Desa memiliki potensi yang sangat strategis bagi pendapatan desa. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa paling banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, selanjutnya diikuti oleh pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasistas Pemerintaan, dan program kemasyarakatan. Pengelolaan keuangan desa diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah yang berperan penting sebagai *leading institution* pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sementara di tingkat pusat, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangan desa secara sampling. Dana Desa menjadi ranah pengawasannya karena dana desa adalah uang yang berumber dari APBN sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang berlaku (Khoiriah dan Meylina, 2017).

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sudah dibahas di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Hasil uji pemilihan model estimator terbaik membuktikan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terpilih.
b. Berdasarkan uji kebaikan model pada model pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) terbukti bahwa model terestimasi eksis dengan nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0,651514, artinya sebesar 65,15% variabel perubahan Indeks Desa Membangun dipengaruhi oleh variabel Dana Desa, sedangkan sisanya sebesar 34,85% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

c. Berdasarkan uji validasi pengaruh (uji *t*) dapatdiketahui bahwa secara parsial variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Klaten.
d. Berdasarkan hasil uji kebaikan model (uji *F*) dengan nilai Probabilitas F-statistic yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukan bahwa secara simultan variabel Dana Desa berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM).
e. Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* (FEM) mengenai pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) diseluruh kecamatan di Kabupaten Klaten, diketahui bahwa efek koefisien konstanta tertinggi terdapat di Kecamatan Klaten Utara dengan nilai konstanta -0.524, Kecamatan Klaten Tengah dengan nilai konstanta -0.440, dan Kecamatan Kalikotes dengan nilai konstanta -0.424.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

a. Dilihat dari besarnya pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) maka pemerintah perlu berupaya untuk mewujudkan pembangunan desa yang merata, terutama di kecamatan-kecamatan yang masih tertinggal dan pemberdayaan penduduk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terlihat dalam peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) setiap desa.
b. Pemerintah diharapakan untuk menggali potensi-potensi daerah yang belum dilakukan secara optimal agar dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
c. Pemerintah diharapakan dapat meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan.
d. Pemerintah diharapkan memprioritaskan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Klaten yang pertama dalam bidang SDGs desa guna mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah

perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Yang ketiga adalah program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, salah satunya pengembangan desa wisata. Dan yang terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru desa karena adanya situasi pandemi virus COVID-19 ini mengharuskan setiap pemerintah desa menghimbau masyarakatnya untuk bersama-sama menghentikan penyebaran virus.

e. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan atau menambah variabel lain yang lebih bervariasi. Apabila menggunakan variabel yang sama, sebaiknya menambah rentang waktu yang digunakan agar hasilnya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., dan Nurhasanah, N. (2019). "The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District". *Jurnal Bina Praja*, *11*(2), 125–136.

Amir, A., Junaidi dan Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya.*

Arfiansyah, M. A. (2020). "Dampak Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah". *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *1*(1), 91–106.

Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: STIE-YKPN

Badan Pusat Statistik. (2021). *Tingkat Kemiskinan Desa dan Kota Tahun 2000-2008 (persen).* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2021). *Jumlah Penduduk 2020 di Kabupaten Klaten*. Klaten: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (2021). *Penduduk dan Ketenaakerjaan.* Klaten: Badan Pusat Statistik.

Devyana, N. S. (2020). "Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Ngroto , Kecamatan Pujon , Kabupaten Malang)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, *8*(2), 1-15.

Gujarati, D. N., & Dawn C. Porter. (2008). *Basic Econometric (fifth edition)*. New

York: MCGraw-Hill Inc.

Hulu, Y., Harahap, R. H., dan Nasutian, M. A. (2018). "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(1), 146-154.

Kementerian Desa. (2021). *Dana Desa Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020*: Sistem Informasi Desa.

Kementerian Desa. (2021). *Indeks Desa Membangun Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat.*

Khoiriah, S., dan Meylina, U. (2017). "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *46*(1), 20–29.

Rafsanzani, H., Supriyono, B., dan Suwondo. (2013). "Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik*, *1*(4), 67–72.

Ristanti, Y. D., dan Handoyo, E. (2017). "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah". *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, *2*(2), 115–122.

Ritonga, A., Handra, H., dan Andrianus, F. (2021). "Pengaruh Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat". *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, *16*(2), 277.

Rosalinda, O. (2014). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Brawijaya*, *10* (1), 1–14.

Tambunan, B. H., Sihombing, M., dan Harahap, R. H. (2020). "Membangun di Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli The Role of Village Funds in Developing Village Index North Sumatra Province". *Jurnal Online Universitas Medan Area*. *9*(2), 438–446.

Triyono, Achyani, F., dan Arfiansyah, M. A. (2019). "The Determinant Accountabillity of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District)". *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Vol 4, No 2 (2019)*, 118–135.

Wahyuddin, Ramly, A. R., Djalil, M. A., dan Indriani, M. (2020). "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kecamatan

Kuala, Kab Nagan Raya". *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, *4*(1), 1–12. 6

Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis* (*edisi pertama*). Yogyakarta: Ekonisia.

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wijaya, D. N., Arifin, Z., dan Hadi, S. (2018). "Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 156–166.

Zuliyah, S. (2010). "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah". *Journal of Rural and Development*, *1*(2), 151–160.